

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KAMPUNG TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Oleh: Suryo Cipto Nugroho

Suryociptonugroho25@gmail.com

Pembimbing: Dr. Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program in Indonesia in the form of Social Assistance. This assistance is given to poor and vulnerable families with certain requirements that have been registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The goals of PKH are expected to be able to improve the living standards of Beneficiary Families (KPM), reduce the burden of spending and increase family income, change the behavior and independence of KPM, reduce poverty and inequality, and introduce the benefits of formal financial products and services to KPM. The focus of this study is to analyze how the effectiveness of the implementation of PKH in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency, which is analyzed using four effectiveness variables, namely targeting accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. With a qualitative approach, the selection of informants using a purposive sampling technique. Data collection techniques are used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the PKH program in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency had not been effective, this was due to invalid data, there were main obstacles for KPM PCH with Elderly criteria, and lack of coordination between PKH facilitators and the Village Government of Teluk Merbau.

Keywords: Welfare, Effectiveness, Family Hope Program

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidak mampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi masalah utama ketika membahas tentang kesejahteraan umum.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan misalnya, Badan Pusat Statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Dalam pengertian lain disebutkan *“Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan*

pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi apabila tertangani dapat meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dimana sumber pendanaan program PKH telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 pasal 57 yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)*. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Dengan adanya program tersebut pemerintah bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH

2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis mengambil rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
2. Apa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Teluk Merbau.
2. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Teluk Merbau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Akademis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi terhadap pengaruh Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus pada PKH di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Penulis

Bagi peneliti ini merupakan salah satu kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan, peneliti juga dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori untuk menyelesaikan permasalahan dilapangan.

c. Praktis

Bagi pemerintah dan masyarakat Kampung Teluk Merbau ini menjadi sumbangsih pemikiran, dengan adanya penelitian tentang Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sehingga memberi gambaran serta masukan dalam efektivitas implementasi program PKH dan untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas merupakan sebuah unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di sebuah organisasi, program, atau kegiatan. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa:

“Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Ketika suatu program berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tersebut telah menjalankan organisasi dengan efektif”

Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Selain itu Sedarmayanti (2006:61) juga menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Lebih lanjut Kurniawan (2005:109) menjelaskan bahwa:

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Maka ukuran efektivitas dapat dilihat dengan target yang dicapai oleh setiap organisasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya”.

2.1.2. Pendekatan Efektifitas

Lubis dan Husseini menyatakan bahwa, ada tiga pendekatan utama yang dapat digunakan dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*), dimana efektivitas diukur dari input yang ada. Pendekatan ini lebih mengutamakan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang dibutuhkan oleh organisasi.
- b. Pendekatan proses (*proses approach*), yaitu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pendekatan ini lebih berfokus pada *output* untuk mengukur hasil pencapaian yang telah direncanakan. Makmur (2008:8) menyatakan bahwa penentuan sasaran yang baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya

Sinambela (2008:82) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam menentukan proses kebijakan atau program pembangunan.

Dari tiga pendekatan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya efektivitas merupakan sebuah konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi ataupun lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektifitas menurut Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60) dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor internal, meliputi seluruh faktor yang berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama merupakan unsur terpenting dalam suatu lembaga dimana dengan hubungan kerjasama yang baik maka pencapaian tujuan akan lebih cepat. Adapun faktor-faktor internal tersebut meliputi :

- 1) Departemenisasi, yaitu kegiatan dalam menyusun satuan suatu lembaga,
- 2) Fleksibilitas, yaitu suatu keadaan dimana struktur organisai mudah diubah sesuai tuntutan dan kebutuhan yang ada,
- 3) Berkelangsungan, yaitu kondisi untuk memberikan dukungan dengan sumber daya yang dimiliki agar aktivitas terus berjalan,
- 4) Kepemimpinan (Leader), yaitu proses pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan yang saling terkait agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
- 5) Kesiambungan, dimana segala sesuatu ditempatkan pada struktur dan perannya sendiri.

b. Faktor eksternal, meliputi hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata

lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai, inovasi maupun norma sosial yang ada.

Sedangkan Hasibuan dalam Samsudin Dkk (2014:2) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas dibagi menjadi empat yaitu:

a. Kualitas aparatur, kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

b. Kompetensi administrator, yaitu kapasitas untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

c. Sarana prasarana, merupakan peralatan penunjang kerja. Sehingga sarana prasarana menjadi bagian penting dalam mempermudah dan memperlancar terselenggaranya aktivitas.

d. Pengawasan, merupakan satu diantara fungsi manajemen yang merupakan kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin tugas dan tujuan lembaga terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal-hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan atau program harus berjalan secara berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

2.1.4 Pengukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Duncan (dalam Steers, 2008:53) mengemukakan 3 aspek yang dapat digunakan instansi pemerintah maupun swasta dalam mengukur efektivitas suatu program, antara lain:

1. Pencapaian tujuan, yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan sendiri terdiri dari beberapa indikator yaitu kurun waktu pencapaian, pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dan dasar hukum.

2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana sosialisasi.

Pendapat lain menurut Makmur (2015:7), efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut:

1. Ketepatan perhitungan biaya, berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

2. Ketepatan berpikir, ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.

3. Ketepatan tujuan, ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

4. Ketepatan sasaran, penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.2. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat dibawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Sadewo (2007:26) mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah situasi di mana seseorang atau sekelompok orang (keluarga) berada dalam kondisi baik sosial, ekonomi, dan budaya tidak menguntungkan sehingga mereka berada dalam kehidupan yang tidak layak dan tidak sejahtera (*wellfare/well-being*). Wahyudi dkk (2016:1) menyatakan bahwa:

"Konseptual tentang kemiskinan dapat dilihat dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya hidup manusia tidak bermartabat, atau hidup manusia tidak layak sebagai manusia. Pemahaman secara kuantitatif kemiskinan adalah suatu keadaan hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa lazim tidak berharta benda."

2.3.2 Penyebab kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor dimana faktor-faktor yang ada saling berkaitan satu sama lain. Suharto (2009:17) secara konseptual, memaparkan empat faktor penyebab kemiskinan sebagai berikut:

a. Faktor individual

Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya;

- b. Faktor sosial
- c. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
- d. Faktor kultural
- e. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas;
- f. Faktor structural
- g. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

2.4 Program Keluarga Harapan

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Adapun tujuan Program Keluarga Harapan dalam jangka pendek diharapkan mampu mengurangi beban rumah tangga (dampak konsumsi langsung), sedangkan dalam jangka panjang program ini dapat menjadi investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya program PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

2.4.2 Sasaran Program Keluarga Harapan

Menurut pedoman pelaksanaan PKH Kemensos RI 2019 sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Adapun komponen Program Keluarga Harapan, meliputi:

1. Komponen kesehatan: Ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Komponen pendidikan: anak SD/MI atau sederajat; anak SMP/MTs atau sederajat; anak SMA/MA atau sederajat; dan anak usia 6 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Komponen kesejahteraan sosial: lanjut usia 70 (tujuh puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan guna memberikan gejala, fakta, atau kejadian sistematis dan akurat tentang sifat populasi atau daerah tertentu.)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak karena jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pemilihan Kecamatan Dayun karena dinilai kecamatan Dayun merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Siak, akan tetapi peningkatan jumlah KPM sangat signifikan. Sedangkan pemilihan Kampung Teluk Merbau juga didasarkan pada semakin banyaknya jumlah KPM yang ada dan merupakan satu-satunya Kampung yang mendapatkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Dayun.

3.3 Informan Penelitian

Adapun pihak yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1).Keluarga penerima manfaat PKH Kampung Teluk Merbau
- 2).Koordinator pengawas PKH Kecamatan Dayun
- 3).Pendamping PKH Kampung Teluk Merbau
- 4) Perangkat Kampung Teluk Merbau,

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer

Menurut Silalahi (2010:289) data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang terkait dan menguasai permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yakni berupa informasi atau data yang diperoleh dari jawaban informan melalui wawancara serta observasi langsung di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

- 2) Data sekunder

Data sekunder menurut Suwarno (2006:123) merupakan data yang pengumpulannya tidak diusahakan sendiri oleh peneliti, sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkannya saja. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi dasar pelaksanaan Program PKH (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan), Buku Petunjuk Pelaksanaan Program PKH, serta data yang diperoleh dari *website* Kemensos, BPS dan berita terkait PKH.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

2. Observasi
3. Dokumentasi

3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti terjun kelapangan, selama dilapangan dan bahkan setelah selesai di lapangan. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif, fokus analisis data berlangsung selama proses dilapangan yang disertai dengan pengumpulan data. Adapun analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas dan mencapai titik jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) meliputi:

- a.Data collection (Pengumpulan data)
- b.Data reduction (Reduksi data)
- c.Data display (Penyajian data)
- d.Congclusion drawing/vaerification (kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini diluncurkan sejak tahun 2007 di 7 Provinsi, dimana sampai dengan tahun 2020 PKH sudah di implementasikan di 34 Provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Implementasi PKH dikampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dilaksanakan sejak tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Ibu Gusniar selaku pengawas PKH Kecamatan Dayun:

“Untuk Kampung Teluk Merbau, pelaksanaannya itu sudah sejak tahun 2015 mas, dimana dalam satu tahunnya pencairan bantuan PKH itu terbagi menjadi 3 tahap. Biasanya pencairannya itu 3 bulan sekali mas, dengan nominal yang berbeda beda tergantung KPM PKHnya itu masuk kategori yang mana.” (Wawancara pada 16 Juli 2021).

Fokus dalam penelitian ini adalah empat variabel yang menentukan efektivitas PKH menurut Sugiono (2019:20). Oleh karena itu keempat variabel tersebut akan diulas satu per satu untuk menjabarkan efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun ulasannya sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran suatu program yaitu mengenai sejauh mana peserta program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana ketepatan sasaran ini lebih berorientasi kepada jangka pendek dan bersifat operasional, dimana penentu sasaran yang tepat bisa ditetapkan oleh individu maupun melalui organisasi. Dengan demikian apabila sasaran yang ditetapkan kurang tepat sasaran maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan pada program itu sendiri.

Penentuan sasaran dalam suatu program kebijakan merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh pada tujuan yang telah ditetapkan. Ketika sasaran sudah ditentukan maka tidak akan menimbulkan ketidak tepatan sasaran. Penentuan KPM PKH sendiri ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

b. Sosialisasi program

Sosialisasi suatu kebijakan ataupun program merupakan sebuah upaya menyebarluaskan substansi atau isi dari suatu program/kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, tidak terkecuali bagi kelompok sasaran agar mampu dan bersedia menjalankan perannya dalam mensukseskan tujuan yang ingin dicapai oleh program/kebijakan tersebut.

Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam mensoasialikan program tersebut kepada para KPM PKH di setiap wilayah. Dimana pendamping PKH memiliki dua tugas utama yaitu tugas program dan pertemuan rutin kepada para KPM PKH. Tugas program merupakan tugas awal yang dilakukan oleh pendamping PKH meliputi proses pertemuan awal, sosialisasi kepada calon KPM, masyarakat umum, dan pembentukan kelompok. Sedangkan tugas rutin Pendamping PKH yaitu melakukan pertemuan rutin dengan KPM PKH.

Dalam proses sosialisasi program PKH dikampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, pendamping PKH memiliki strategi pada tahap pertemuan awal. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memberikan undangan berupa Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada masyarakat kampung Teluk Merbau yang terdata dalam kategori Miskin.

c. Tujuan Program

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat diukur keberhasilannya jika tujuan dan ukuran kebijakan tersebut memang sesuai dengan keadaan di level pelaksana kebijakan. Ketika tujuan kebijakan jelas maka tidak akan terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana dalam hal ini Pendamping PKH dengan KPM PKH Kampung Teluk Merbau. Dengan adanya PKH diharapkan mampu meminimalisir dan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi di Kampung Teluk Merbau.

d. Pemantauan Program

Berjalan atau tidaknya suatu program kebijakan dapat dilihat melalui proses monitoring atau pemantauan. Pemantauan digunakan pada saat program atau kebijakan dalam proses pelaksanaan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program agar dapat diatasi dengan baik. pemantauan sendiri merupakan salahsatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program PKH dilaksanakan. Ruang lingkup Pemantauan sendiri dilihat dari Input, proses dan output.

5.2 Dampak Program keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Teluk Merbau

5.2.1 Dampak Positif

Dampak positif yang ditimbulkan oleh Program Keluarga Harapan untuk keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu:

- a. Meringankan beban pengeluaran RTSM dan dapat membantu keluarga yang menjadi peserta PKH untuk membiayai anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA.
- b. Meningkatkan partisipasi pemeriksaan kesehatan anak balita dan kesejahteraan sosial untuk memastikan pemberian asupan gizi untuk lansia dan disabilitas.

5.2.2 Dampak Negatif

Ketergantungan terhadap bantuan. Maksud dari ketergantungan yaitu orang tua penerima hanya bergantung dengan bantuan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Informan dari penerima bantuan komponen disabilitas mengatakan bahwa Pemerintah kadang tidak tepat waktu memberikan bantuan tersebut, kadang kala bantuan tersebut bisa terlambat 1 minggu bahkan pernah sampai 1 bulan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terbagi dalam empat variable, yaitu:
2. Ketepatan sasaran KPM PKH yang ada di Kampung Teluk Merbau belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena lamanya pembaharuan data kemiskinan dan banyaknya KPM PKH Teluk Merbau yang tidak atau belum memiliki adminduk.
3. Sosialisasi ataupun pertemuan KPM PKH memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang ada di Kampung Teluk Merbau. Dengan tingginya jumlah partisipasi KPM PKH dalam pertemuan rutin maka akan meningkatkan wawasan KPM PKH terutama di Kampung Teluk Merbau sehingga mampu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH terhadap pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
4. Dalam mencapai Tujuan program PKH, tentunya dibutuhkan upaya dari pelaksana program PKH dan KPM PKH. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan kepada KPM PKH berupa uang Tunai dengan nominal yang berbeda-beda sesuai komponen syarat yang di butuhkan.
5. Pemantaun terhadap KPM PKH di Kampung Teluk Merbau sudah dilakukan secara rutin oleh Pendamping PKH Kampung Teluk Merbau, akan tetapi kurangnya koordinasi pendamping PKH dengan Pemerintah Kampung Teluk Merbau menyebabkan proses pemantauan terkait pelaksanaan program PKH berjalan kurang Efektif. melihat peran pemerintah Kampung sebagai seseorang yang paling dekat dengan masyarakat.

6. Dampak Program keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terbagi dua, yaitu:
- a. Dampak positif yaitu mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar dapat membantu keluarga peserta untuk membiayai dalam hal biaya pendidikan dan untuk meningkatkan partisipasi pemeriksaan dalam hal kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan asupan gizi lansia dan disabilitas.
 - b. Dampak negatif yaitu ketergantungan terhadap bantuan. Maksud dari ketergantungan yaitu orang tua penerima hanya bergantung dengan bantuan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Informan dari penerima bantuan komponen disabilitas mengatakan bahwa Pemerintah kadang tidak tepat waktu memberikan bantuan tersebut, kadang kala bantuan tersebut bisa terlambat 1 minggu bahkan pernah sampai 1 bulan.

5.2 Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kampung Teluk Merbau, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan pemerintah desa lebih berkontribusi dalam proses pelaksanaan program PKH, baik dalam proses pendataan atau pengawasan. Sehingga bantuan PKH benar-benar bermanfaat bagi keluarga penerima.
- 2) Bagi Pendamping PKH, diharapkan agar proses verifikasi dan validasi KPM PKH di Kampung Teluk Merbau dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga tidak terjadi ketidak tepatan sasaran bantuan PKH di Kampung Teluk Merbau.
- 3) Bagi penerima PKH, sebaiknya dalam mengelola dana bantuan yang diberikan PKH digunakan semaksimal mungkin untuk membeli kebutuhan sesuai komponennya. Sehingga KPM PKH dapat

benar-benar ikut mensukseskan tujuan Program yang telah ditetapkan

- 4) Bagi Penelitian selanjutnya, perlu adanya penelitian mengenai efektivitas program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah diimplementasikan. sehingga dapat memberi pengetahuan program mana saja yang memberi pengaruh besar terhadap pengentasan masalah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwi, Syafaruddin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: PPSK-UGM.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2015. Pengembangan Sumber Daya manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rivai, Veithzal. 2005. Performance Appraisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Roziqin, Muhammad Zainur. 2010. Kepuasan Kerja. Malang: Averroes Press.
- Ruky, Achmad S. 2001. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samsudin, Sadili. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia.
- Umar, Husein. 2003. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wibowo. 2015. Manajemen Kinerja. (edisi 5) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jurnal
Aditama, Pria Bintang & Nina Widowati. 2018. Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. eJournal Adminitrasi Publik
- Perundang-Undangan
UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian